

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badjeber, H. Zain, 1985, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Syahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Rizkita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Bachtiar & Sulaiman Hamid, 1997, *Hukum Internasional II*, USU, Medan.
- Huda, Ni'Matul, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Nusa Media, Bandung.
- Libertus, Jehani, 2008, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, A. 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terjemahan M. Isa Arief. Intermasa, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sjarif, Surini Ahlan, 1982, *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumarja, Fx. 2012, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utomo, Tri Widodo W. 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.

## B. Tesis

Mudita, I Wayan, “Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran di Kabupaten Badung Provinsi Bali”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Paramita, Andhina, “Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Menurut Perspektif Hukum Waris KUHPerdara, UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan (Penelitian di Perkumpulan Wanita Indonesia dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi di Jakarta)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seseorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi.

#### **D. Sumber Internet**

<http://Hukumonline.com>, diakses tanggal 14 April 2015.

<http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 10 Februari 2015.

<http://kumpulanakta.blogspot.com>, diakses tanggal 16 April 2015.

<http://msatuankumachudum.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Februari 2015.

<http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 14 Februari 2015.

<http://www.asiamaya.com>, diakses tanggal 4 Februari 2015.

<http://repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 8 Juli 2015.

<http://www.lihatdisini.com>, diakses tanggal 17 September 2015.